



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGIYARTO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANTEN**
3. NHK : **124833**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.125.777.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/240 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.240.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 595 m2/200 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 334.175.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/149 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 756.086.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1551 m2/120 m2 di KAB / KOTA CILACAP, WARISAN Rp. 788.136.000
5. Tanah Seluas 1005 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
6. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 32.640.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 282.100.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR 250R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 23.250.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS TRD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 251.850.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 6.187.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 50.400.000



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	249.234.169
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.713.698.169
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.713.698.169

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.